GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar	**:**	**Jurnal Nasional**	**Tgl/Bln/Thn**	**:**	**13 November 2007**
Subyek	**:**	**REDD**	**Hari**	**:**	**Selasa**
			Halaman	**:**	**18**

REDD Bisa Dilaksanakan di Indonesia

Bambang Setiono

Perubahan iklim dan kerusakan hutan adalah dua masalah lingkungan yang punya pengaruh negatif sangat besar kepada rakyat Indonesia khususnya dan masyarakat dunia umumnya. Pembuangan gas CO2 yang diakibatkan penggunaan bahan bakar minyak dan batubara yang berlebihan serta penggundulan hutan telah menyebabkan suhu udara semakin panas. Meningkatnya suhu udara telah membuat permukaan air laut meningkat dan meningkatnya kekeringan diberbagai daerah. Peningkatan permukaan air laut menyebabkan banjir yang semakin parah sementara kekeringan telah menurunkan produktivitas pertanian di Indonesia. Jika pembuangan CO2 dan gas-gas perusak rumah kaca lainnya tidak segera dihentikan, daerah-daerah di Indonesia akan lebih sering kebanjiran dan kekeringan.

Dunia saat ini berharap kepada Indonesia untuk memberikan inspirasi mengatasi kedua masalah ini sekaligus. Bulan Desember mendatang, para pemimpin dunia akan berkumpul di Bali untuk menegosiasikan cara-cara yang bisa diterima negara maju dan negara berkembang untuk bisa mengurangi kedua masalah ini. Fokus negosiassi akan dipusatkan kepada upaya negara berkembang seperti Indonesia menjaga hutannya dan insentif yang akan diberikan oleh negara maju bagi upaya yang akan dilakukan oleh negara berkembang tersebut.

Mengurangi penggundulan hutan (deforestasi dan degradasi) akan memberikan dua dampak positif sekaligus bagi upaya untuk mengurangi emisi CO2. Jika hutan tidak ditebang ia bisa sebagai media penyerap CO2 dan tentu saja tidak akan menyebabkan terjadinya emisi CO2. Indonesia saat ini dianggap sebagai negara produsen CO2 terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan China. Laporan sebuah LSM dari Belanda (*Wetlands International*) menyebutkan bahwa penggundulan hutan di Indonesia telah menjadi faktor utama penyebab terjadinya emisi CO2 di negara ini. Pada masa ini tingkat penggundulan hutan di Indonesia adalah tertinggi di dunia, yaitu sekitar 1,5 juta sampai 2 juta hektar per tahun. Setiap pohon yang ditebang akan melepaskan CO2 yang tersimpan di dalam daun dan akar pohon tersebut. Sementara CO2 yang tersimpan di dalam batang pohon akan tersimpan terus di dalam produk kayu yang dihasilkan dari batang pohon tersebut. Dapatkah proses penggundulan hutan ini dihentikan melalui prakarsa perubahan iklim yang digarap oleh PBB?

Di Bali, pemerintah Indonesia akan mengusulkan prakarsa baru dengan nama pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi atau dikenal dengan istilah REDD. Prakarsa ini menuntut untuk setiap ton emisi CO2 yang berhasil dikurangi - karena tidak menebang pohon - harus diberikan penghargaan. Jika hutan tidak dikonversi untuk lahan perkebunan, hutan tanaman industri, atau pertambahan batu bara, harus diberikan ganti rugi. Bahkan pemerintah Indonesia akan meminta kompensasi kepada dunia internasional untuk menjaga taman nasional, hutang lindung, dan hutan-hutan untuk tujuan konservasi lainnya.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Prakarsa REDD

Jika ada dana ganti rugi dan kompensasi untuk menjaga hutan melalui prakarsa REDD, kita bisa berharap dana tersebut akan diberikan kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam menjaga hutan. Dana tersebut akan diberikan secara tepat waktu dan tepat jumlah kepada pemerintah daerah yang mau menghentikan program pembangunan industri perkebunan dan pertambangan, kepada perusahaan yang membatalkan izin perkebunan dan pertambangan, dan kepada masyarakat yang ikut terlibat dalam menjaga hutan. Dana tersebut juga akan diberikan kepada departemen dan instansi yang terkait dengan pembuatan kebijakan di bidang industri kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.

Kita berharap, janji-janji pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk mengubah kebijakan dan prakteknya di bidang kehutanan, perkebunan, dan pertambangan akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Sehingga janji untuk menjaga hutan akan direalisasi sesuai perjanjian atau kesepakatan yang tertuang di dalam perjanjian pengurangan emisi CO2 dengan negara, perusahaan, atau masyarakat di negara maju yang diwajibkan mengurangi emisi CO2.

Namun, harapan itu mungkin masih jauh. Kasus bebasnya Adelin Lis telah memperlihatkan compang-campingnya pengelolaan hutan di Indonesia. Indonesia juga belum memiliki pengalaman yang baik dalam mengelola dana-dana kehutanan seperti Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Sistem penyaluran dana ini kepada pemerintah daerah belum dapat dilakukan dengan tepat waktu dan tepat jumlah sementara sistem pengumpulan dananya juga belum mampu memperlihatkan akuntabilitas masing-masing perusahaan yang wajib membayar DR dan PSDH.

Dengan kinerja seperti ini, kiranya akan sulit bagi praksarsa REDD untuk mengurangi deforestasi di Indonesia. Terlebih lagi jika pasar karbon tidak jelas bentuknya dan tidak berada di Indonesia. Siapa pembeli sertifikat karbon dan siapa penjualnya? Jika banyak broker terlibat dalam perdagangan sertifikat karbon, uang yang tersedia untuk ganti rugi dan kompensasi mengurangi deforestasi akan semakin kecil diterima oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Diperlukan kerja sangat keras untuk mengubah pandangan pesimis tentang REDD ini. Pemerintah perlu menggalang kekuatan masyarakat, professional kehutanan, serta professional keuangan di Indonesia untuk menyusun strategi pengelolaan hutan berbasis kepada pengurangan emisi CO2 dan perdagangan karbon. Pemerintah juga perlu memberikan ruang kepada masyarakat untuk memperlihatkan profesionalismenya dalam melaksanakan strategi tersebut.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP